

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan salah satu bentuk dari penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. LKPP disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kebijakan Akuntansi. Berdasarkan SAP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, bahwa Laporan Keuangan disusun untuk menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Oleh karena itu, informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan pemerintah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Sistem informasi telah menjadi bagian integral dari organisasi modern dan menawarkan berbagai manfaat seperti peningkatan efisiensi dan produktivitas. Selain sektor swasta, sektor publik juga harus merespons perubahan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah atau organisasi sektor publik disebut *e-Government*. Di Indonesia, Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara (BUN) berupaya mengadopsi teknologi untuk mengotomatisasi pengelolaan dana masyarakat agar lebih akuntabel, transparan, akurat dan efisien (Harahap & Gultom, 2024).

Direktorat Jendral Pembendaharaan mengembangkan suatu aplikasi yang digunakan membantu proses monitoring aplikasi SAKTI dan SPAN sebagai upaya pengembangan proses bisnis. MonSAKTI merupakan aplikasi monitoring semua kegiatan yang terjadi pada aplikasi sakti yang digunakan oleh satuan kerja. Berdasarkan surat Direktur Jendral Perbendaharaann Nomor S29/PB/PB.6/2022 aplikasi MonSAKTI mulai dipergunakan pada tanggal 12 Juli 2022.

Salah satu fitur aplikasi MonSAKTI adalah *to do list*, fitur ini digunakan untuk mengendalikan, memantau, rekonsiliasi, mengendalikan dan melaporkan transaksi keuangan pemerintah. Fitur *to do list* menjadi tiga bagian yaitu penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Pihak pemerintahan menggunakan fungsi *to do list* untuk meningkatkan kualitas data dalam laporan keuangan. *To do list* merupakan alat penting di MonSAKTI untuk menghasilkan keakuratan pelaporan keuangan. Jika bulan ini belum terselesaikan dan masih nampak pada bulan depan dapat mempengaruhi kualitas data laporan keuangan (Salsabila & Laksi, 2023).

Aset tetap adalah asset berwujud yang diperoleh secara struktual, siap digunakan dalam operasional suatu perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari kegiatan usaha normal perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (Hartoko, 2017).

Dalam pengelolaan aset tetap di berbagai instansi pemerintah, termasuk di KPPN Yogyakarta, aplikasi Monsakti digunakan sebagai alat utama untuk mendukung pencatatan, pelacakan, dan pelaporan aset. Modul aset tetap dalam aplikasi ini dirancang untuk memastikan bahwa semua aset yang dimiliki tercatat dengan akurat dan dapat dipantau dengan mudah. Namun, meskipun aplikasi ini telah membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan aset, implementasi praktis dari sistem *To Do List* dalam modul aset tetap seringkali menghadapi tantangan. Salah satu tantangan yang sering dihadapi dalam pengelolaan aset tetap adalah situasi di mana aset telah dilakukan Reklasifikasi Masuk (RM) namun belum diikuti oleh Reklasifikasi Keluar (RK). Kondisi ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara data fisik dan data keuangan aset tetap dalam sistem. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelaporan keuangan, mengurangi akurasi informasi aset, dan menghambat pengambilan keputusan yang berbasis data. Oleh karena itu, penting bagi setiap unit kerja untuk memastikan bahwa setiap RM aset diikuti dengan RK secara tepat waktu dan konsisten, guna menjaga integritas data aset serta memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan aset tetap berjalan secara sinergis dan efisien.

Masalah transfer keluar aset yang belum disertai dengan transfer masuk merupakan salah satu tantangan serius dalam pengelolaan aset tetap. Situasi ini terjadi ketika aset telah dicatat sebagai keluar dari satu unit atau lokasi, tetapi belum diterima atau dicatat oleh unit atau lokasi penerima. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam catatan aset, mengganggu proses audit, dan menimbulkan risiko hilangnya aset. Selain itu, masalah ini juga dapat menyebabkan kebingungan dalam pelaporan keuangan dan menghambat pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap transfer keluar aset diikuti oleh pencatatan yang tepat dan cepat pada unit penerima guna menjaga integritas data dan akuntabilitas aset

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Apa saja kendala yang menyebabkan aset tetap dalam RK asset belum RM?
2. Bagaimana dampak dari RK aset belum RM terhadap pengelolaan aset disatuan kerja?
3. Apa saja langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan bahwa semua aset tetap dalam RK mengalami proses rekonsiliasi dan mutasi secara tepat waktu?
4. Bagaimana tingkat pemahaman dan keterampilan pengguna dalam mengelola RK aset yang belum melalui rekonsiliasi dan mutasi di KPPN Yogyakarta?
5. Apa saja kendala teknis dan administratif yang menyebabkan aset tanah dan bangunan belum mengalami proses mutasi pada aplikasi MonSAKTI?
6. Bagaimana tingkat keakuratan dan kelengkapan data aset tanah dan bangunan yang belum dicatat dalam TM aset di aplikasi MonSAKTI?

1.3 Tujuan Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah menambah pengetahuan pembaca tentang masalah-masalah yang ada dan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi , dan dapat memberikan masukan untuk lebih mengoptimalkan:

1. Menjelaskan kepada pembaca tentang kendala yang menyebabkan aset tetap dalam RK aset belum RM.
2. Menjelaskan kepada pembaca mengenai dampak Rk aset belum RM terhadap pengelolaan aset di satuan kerja .
3. Menjelaskan kepada pembaca mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan bahwa semua aset tetap dalam RK mengalami proses rekonsiliasi dan mutasi secara tepat waktu.
4. Menjelaskan kepada pembaca mengenai tingkat pemahaman dan keterampilan pengguna dalam mengelola RK aset yang belum melalui rekonsiliasi dan mutasi di KPPN Yogyakarta.
5. Menjelaskan kepada pembaca mengenai kendala teknis dan administratif yang menyebabkan aset tanah dan bangunan belum mengalami proses mutasi pada aplikasi MonSAKTI.
6. Menjelaskan kepada pembaca mengenai tingkat keakuratan dan kelengkapan data aset tanah dan bangunan yang belum dicatat dalam TM asset di aplikasi MonSAKTI.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pembahasan dan tujuan penulisan diatas, laporan tugas akhir ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya;

1. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan sebagai sarana untuk membangkitkan minat, kreatifitas dan daya pemikiran ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah khususnya yang berkaitan dengan *To Do List* modul aset tetap pada lingkup KPPN Yogyakarta.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi KPPN Yogyakarta dalam mempersiapkan serta optimalisasi pemakaian aplikasi Monsakti.

3. Bagi Penulis

- 1) Dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di politeknik YKPN.

- 2) Mengembangkan daya pikir, kreativitas, tanggung jawab dalam mengerjakan laporan Tugas Akhir.
- 3) Mendapatkan pengetahuan mengenai topik Tugas Akhir.
- 4) Dapat meningkatkan cara mengolah dan menganalisis laporan dengan baik.

4. Bagi Pembaca

1) Bagi Pembaca Akademik

Dapat menambah pengetahuan bagi pembaca dan dapat digunakan untuk sumber referensi.

2) Bagi Pembaca Umum

Dapat menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai Analisis *To Do List* Modul Aset Tetap Pada Aplikasi MonSAKTI.

3) Bagi Pembaca Instansi

Memberikan informasi tentang kinerja aplikasi MonSAKTI pada lingkup KPPN Yogyakarta.